



Peran Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng Dalam Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat

Ahmad Fanani¹, I Made Yudana², I Wayan Kertih³

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : ahmadfanani766@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : made.yudana@undiksha.ac.id

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: wayan.kertih@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2020

Diterima: 16 Februari 2020

Terbit: 1 Maret 2020

Keywords:

the nation's resurrection party, Political Education.

Kata kunci:

Partai Kebangkitan Bangsa, Pendidikan Politik.

Abstract

Political education is means for political parties to develop the quality of their cadres and party members in responding to challenges in the political world in Indonesia. This can be proven by the cases where high-ranking politicians have been involved in corruption cases, violating moral norms, and criminal acts. The formulation of the problem in the research is how the efforts of political parties in implementing political education for the community in Buleleng district in increasing public participation in general election contestation. What factors are the obstacles and supporters in carrying out political education. In this research method using qualitative research. By using interview and documentation methods. To check the validity of this study, the triangulation technique was used. And qualitative descriptive was used as data analysis. The results of the research show that the National Awakening Party of Buleleng Regency in political education is not discussed in depth but political education has been included in the work program that has been made by political party administrators, both in the fields of cadres, public policy, and public development. So that the research can draw the conclusion that the political education carried out by the National Awakening Party is to improve the quality of cadres, increase public intelligence about politics. Maintaining communication between DPAC and DPRanting with these activities Suggestion from the envious research is that there is a need for cadres who are involved in providing political inquiry, the Regional Leadership Council must disregard every activity carried out by DPAC and DPRanting.

Abstrak

Pendidikan politik merupakan sarana bagi partai politik untuk mengembangkan kualitas kader maupun anggota partai dalam menjawab tantangan di dunia politik yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan kasus-kasus banyaknya para petinggi politikus terjerat kasus korupsi, melanggar norma

Corresponding Author:
ahmadfanani766@gmail.com

kesusilaan, dan tindak pidana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ialah Bagaimana upaya partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat di kabupaten Buleleng dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pendidikan politik. Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan penelitian ini maka digunakan dengan teknik triangulasi. Dan deskriptif kualitatif digunakan sebagai analisis data. Hasil dari penelitian bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng dalam pendidikan politik tidak dibahas secara mendalam tetapi pendidikan politik sudah tertuang dalam program kerja yang sudah dibuat oleh pengurus partai politik, baik dibidang kaderisasi, kebijakan publik, dan pembangunan keummatan. Sehingga penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan kualitas kader, meningkatkan kecerdasan masyarakat tentang politik. Menjaga komunikasi dengan DPAC maupun DPRanting dengan ada kegiatan tersebut. Saran dari penelitian ini adalah perlunya ada kader yang memumpuni dalam materi pendidikan politik, Dewan Pimpinan Daerah harus menghadiri setiap kegiatan yang dilakukan oleh DPAC dan DPRanting.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Pada tahun 1998 kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan yang hal ini disebut era reformasi. Salah satu perubahan yang sangat nampak adalah di bidang politik dimana selama pemerintahan orde baru semua elemen masyarakat dikendalikan oleh pemerintah yang otoriter. Menurut Roger F. Saltou (Dalam Ebyhara,2016: 40) menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Memang prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis adalah tiap warga negara ikut aktif dalam proses politik. Upaya untuk melindungi kepentingan WNI (Adnyani, N.K.S, 2015 : 69). Salah satu bentuk perubahan hasil reformasi adalah adanya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai 2002. Dampak amandemen tersebut mempengaruhi kebebasan dalam berpolitik, salah satu wujud perubahannya yakni banyak partai politik yang bermunculan yang selama masa orde baru dibungkam. Bahkan ada yang memberanikan diri untuk mendirikan partai baru baik berideologi agama maupun nasionalis. Menurut Adnyani, N.K.S. (2016 : 30), *For the Indonesian government continues to boost economic growth in Indonesia in various fields for the sake of the public welfare.*

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik biasanya melaksanakan empat fungsi. *Pertama*, sebagai sarana komunikasi; *kedua*, sarana sosialisasi politik; *ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik; dan *keempat*, partai politik sebagai sarana pengatur konflik (Miriam Budiarjo, 1980, 1981: 163-164). Dari keempat fungsi tersebut maka, peran yang paling mendasar dari partai politik adalah mengarah ada formulasi dan implementasi dari kebijakan publik yang akan mengatur masyarakat. Serta mengorganisasikan warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Hal ini juga bisa dilihat pendapat Prof. Dr. J. Barents (Dalam Papasi, 2010:3) bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan negara. dari define tersebut sangat jelas bahwa bagaimana tentang kehidupan yang menggambarkan suatu negara lahir, bagaimana suatu negara memiliki tujuan negara dan bagaimana negara itu membangun sebuah sistem dan tujuan negara yang telah ditentukan.

Partai politik mulai diorganisir pada abad ke 18 dan 19 di eropa barat, sebagai wadah dan usaha-usaha di luar lingkaran kekuasaan demi untuk merebut dan mengendalikan kebijakan. Ketika kelas atas mulai mengendalikan kelas buruh, maka kelas buruh akan mendesak kelas atas dan aristokrasi dalam memutuskan sebuah kebijakan. Dengan peristiwa tersebut partai politik mempunyai tugas untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah agar tidak ada konflik antara kelas atas dan aristokrasi dengan masyarakat atau kelas buruh. Secara Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan tentang partai politik. Bukan berarti partai politik tidak boleh diatur, apalagi ketika berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Namun pembentukan partai politik pada dasarnya ialah salah satu cerminan hak negara untuk berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat. Seperti isi pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Sedangkan dalam fungsi partai politik dalam Undang-Undang menyatakan BAB 5 pasal 10 No. 02 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Partai Politik menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana. Berbunyi : 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi perstuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 3) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 4) Ekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Dari keempat fungsi partai politik diatas, fungsi yang paling substansial dalam partai politik yang pertama adalah memberikan pendidikan terhadap anggota dan masyarakat agar mempunyai kesadaran dalam berdemokrasi. kedua, membuat kebijakan yang berorientasi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menjadi penting dan strategis bagi partai politik dalam memberikan pendidikan politik dalam meningkatkan pengetahuan tentang politik dan ada rasa partisipatif yang kritis dalam pelaksanaan demokrasi (pemilu). Menurut (Prihatmoko, 2003: 74) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya,

dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia non formal oleh partai politik, media masa, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pendidikan politik menjadi sarana penting, karena dalam pembangunan terhadap sebuah negara membutuhkan pendidikan kepada masyarakat dari segi politik. Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan mandiri dalam berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam membangun bangsa. Kehadiran partai politik dapat dilihat perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran aktif dalam pelaksanaan sistem politik dan sekaligus memberikan kritik dan koreksi.

Partai politik di negara-negara berkembang memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik. Berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik sesungguhnya (Muis, 2000:124).

Dengan demikian pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan falsafah Pancasila, yang selama ini mengalami pasang surut yang sangat luar biasa. Pendidikan politik juga menjadi suatu pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam usaha menciptakan sistem politik yang benar-benar demokratis, dinamis dan efisien. Kansil (2000:197) mengatakan bahwa : Tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat. Dijelaskan di atas tentang fungsi partai politik yang tertera pada undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 11 ayat 1 ada satu fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik, yakni pendidikan politik. Rusdi Kantaprawira (2006: 55) menyebutkan : “Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus menjalankan tugas partisipasinya. Pada pokoknya, rakyat perlu pendidikan politik secara kontinu atas nilai-nilai tertentu. Demikianlah, maka masyarakat luas perlu ditingkatkan pengetahuan politiknya agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan perannya, mengetahui apa haknya dan mempunyai tanggung jawab”.

Dalam melaksanakan pendidikan partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa dalam melaksanakan fungsi dan perannya melakukan pendidikan politik terhadap kader maupun masyarakat, ini sangat menarik kiranya jika kita kaji secara mendalam bagaimana cara partai politik melakukan pendidikan politik terhadap kadernya maupun kepada masyarakat. Adapun rumusan pada penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng? 2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng?. Adapun tujuan dari penelitian ini Penulis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik agar tingkat partisipasi terhadap masyarakat meningkat. Dan apa yang menjadi faktor kendala dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Buleleng.

Metode

Menurut Sugiyono (Dalam Prastoro, 2011: 22) menerangkan bahwa metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Di dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Adapun jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini Peneliti akan lebih mudah jika memfokuskan pada lokasi yang akan dilakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng. Adapun waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini selama satu bulan.

Menurut Sugiyono (Dalam Prastoro, 2011: 22) menerangkan bahwa metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Di dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Adapun jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng.

1. Sugiyono (2017: 210-211) mengutip dalam pendapat Spradley mengatakan bahwa, situasi sosial yang menjadi semacam muara dari dominan lainnya, berikutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

Mengkaji prinsip-prinsip aturan yang berasal dari bahan literatur yang ada dalam undang-undang (Adnyani, N.K.S, 2014 : 36), lebih lanjut dilihat pada kenyataan sosial di masyarakat. Approach method in this research is empirical approach (Adnyani, N.K.S., 2017 : 244), dimana kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan pembelajaran secara faktual. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. tidak hanya berpedoman pada teks konsep yaitu kesenjangan antara teori dan *action* (Adnyani, N.K.S., 2020 : 29).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan pendekatan Kasus (*case approach*) mencakup pemangku kepentingan (Purnamawati, I.G.A., Adnyani, N.K.S., 2000 : 143).

Jadi subjek penelitian yang memberikan sumber keterangan penelitian dan data penelitian, maka yang akan menjadi sumber data dan data penelitian ini adalah :

A. Data Primer

sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber primer dalam penelitian tentang pendidikan politik kepada masyarakat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng :

- a. Ketua Umum DPC PKB Kabupaten Buleleng
- b. Pengurus DPC PKB Kabupaten Buleleng
- c. Calon DPD dari DPC PKB Kabupaten Buleleng
- d. Masyarakat

B. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh secara tidak langsung kepada peneliti. Maksudnya data yang bisa diperoleh melalui dokumentasi, buku, AD/ART, peraturan partai politik, jurnal dan lain sebagainya. Jadi sumber sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer.

Karena penelitian ini dilakukan adalah penelitian kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (tujuan sampling), maksudnya adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan data sampelnya. Menurut Arikunto (Dalam Mustafid, 2017 : 39) yang menjadi salah satu sampel bertujuan adalah : dari mana dan siapa yang mengambil sampel ini dimulai tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya tergantung kepada keperluan peneliti.

Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi yang dimaksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai macam sumber jika tidak terdapat sumber lagi informasi yang dapat dijangkau, maka penarikan sampel dapat diakhiri. Jadi kunci disini adalah jika susah terjadi pengumpulan informasi, maka penarikan sampel harus dihentikan.

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mendapatkan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan data dari sebuah penelitian. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

Adapun macam-macam teknik pengumpulan data secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Nasution (Dalam Sugiyono, 2017:106) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat bersih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

b. Wawancara

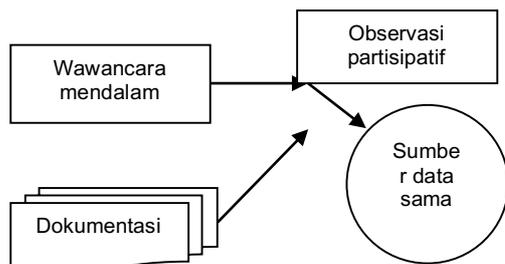
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan

tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan adalah Triangulasi teknik, yakni teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2017:125). Hal ini dapat digambarkan seperti gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Triangulasi “teknik” pengumpulan n data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

Setelah selesai menyusun teknik pengumpulan data yang digunakan, langkah selanjutnya dalam penyusunan rancangan penelitian kualitatif adalah menentukan dan mengemukakan cara kita dalam menganalisis data ketika data itu telah terkumpul

Menurut Miles dan Huberman (Dalam Prastowo, 2011:241) menyatakan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Proses I : Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

b. Proses II : Penyajian Data

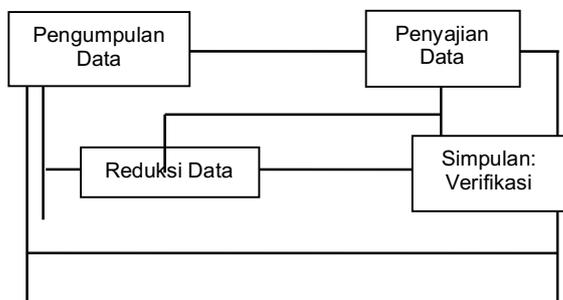
Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang

terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Proses III : Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Untuk melangkah ketiga ini, menurut Miles dan Huberman (2007: 19), kita mulai mencari arti-arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Bagi peneliti yang berkompeten, ia akan mampu menangani kesimpulan-kesimpulan tersebut dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis.

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan model *Miles and Huberman*, yaitu (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data dan (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Upaya penggalian, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas situs (Adnyani, N.K.S., 2016 : 50).



Gambar 1.2 Proses Analisis Data

Pembahasan

Bedasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 137 Tahun 2017 Kabupaten Buleleng tercatat kabupaten terluas di provinsi Bali dengan luas 1,364.73 km² dengan jumlah penduduk 814.356 jiwa. Kabupaten Buleleng juga termasuk daerah yang multikultur baik segi budaya maupun agama. Masyarakat yang mayoritas hindu tidak menutup kemungkinan partai politik yang berbasis Islam bisa berkembang di daerah yang mayoritas Hindu seperti PKB, PKS maupun PPP. Selain itu juga, banyak partai politik nasional yang ada di daerah Buleleng sebagai kendaraan politik dalam kontestasi pemilihan umum baik pemilihan bupati maupun anggota dewan.

Inovasi dari penelitian ini adalah inovasi dalam perumusan kebijakan di level desa adat di Bali (Adnyani, N.K.S., 2016 : 67). Sejalan dengan dinamika yang ada di Indonesia terutama perubahan kepemimpinan pemerintahan maupun kepartaian, tentunya juga akan mempengaruhi dinamika yang ada di daerah Kabupaten Buleleng.

Dilihat dari daerah Buleleng yang minoritas masyarakat muslim tentunya akan menjadi kendala bagi partai yang berbasis agama seperti Partai Kebangkitan Bangsa dalam membesarkan partai politik didaerah yang berbasis minoritas. Pada pemilihan umum tahun 2014 -2019 di Kabupaten Buleleng tidak ada kader Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan kursi di Parlemen. Hal ini menjadi koreksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen atau pemerintahan yang ada di Kabupaten Buleleng. Nilai-nilai ini akan termanifestasi

dari pikiran, sikap, dan perilaku peserta didik dalam memandang, mengelola kelas (Adnyani, N.K.S., 2016 : 866). Mempersiapkan segala upaya agar pemilu selanjutnya dari kader Partai Kebangkitan Bangsa bisa merebut kursi yang ada di parlemen.

Namun pada pemilu tahun 2019-2024 salah satu dari kader Partai Kebangkitan Bangsa bisa berhasil dari menduduki kursi parlemen yakni H. Mulyadi Putra, S.Pd, M. HI. Upaya yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yakni melakukan proses kaderisasi partai secara intens dan pemekaran lembaga yang ada di tingkat kecamatan sampai desa.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kabupaten Buleleng

Dalam sebuah partai politik tentunya mempunyai rujukan atau acuan dalam melaksanakan kegiatan politik. Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung efektifitas keberlakuannya (Adnyani, N.K.S., 2016 : 143). Acuan tersebut biasanya menjadi payung hukum yang dibuat secara musyawarah oleh anggota dan kader partai yang disebut Anggaran dasar (AD) yang tidak bertentangan dengan hukum negara dan mengacu kepada Pancasila. Sementara yang menjabarkan dari Anggaran Dasar secara rinci adalah Anggaran Rumah Tangga (ART). Begitu juga Partai Kebangkitan Bangsa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai rujukan dalam setiap kegiatan partai. Sehingga kegiatan yang mengenai tentang program kerja, kebijakan partai maupun keputusan partai harus terpacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Berkaitan dengan dilaksanakan pendidikan politik terutama bagi anggota dan kader, begitu juga dijelaskan dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa BAB XI pasal 29 a.) partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi b.) pendidikan politik dilaksanakan untuk menanamkan dan menyebarluaskan ideologi serta nilai-nilai perjuangan partai c.) kaderisasi partai dilaksanakan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dibawah kendali dan pengawasan Dewan Pengurus Pusat partai. d.) ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan politik dan kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga partai.

Pentingnya dilakukan penelitian ini, bahwa peneliti menilai ada pembalikan cara berpikir di kalangan akademisi (Adnyani, N.K.S, 2019 : 73). Adapun program kerja Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan pendidikan politik ialah melaksanakan kegiatan pembinaan kader dan anggota mulai tingkat pusat sampai ranting untuk memperkuat ideologis partai politik yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar bisa mengerti tentang politik kebangsaan. Berikut ini merupakan program kerja yang disusun oleh hasil Muskerda (Musyawarah Kerja Daerah) oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan pendidikan politik sebagai berikut :

1. Kaderisasi

Kaderisasi merupakan sebuah proses pendidikan jangka panjang yang dilakukan oleh partai politik untuk mengoptimalkan potensi-potensi kader. Setiap

kader atau anggota partai dibekali dengan beberapa pengetahuan tentang keagamaan, politik, hukum maupun tatanegara.

2. Kebijakan publik

Dibidang kebijakan publik DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng berupaya memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa baik dari tingkat daerah sampai pusat melalui pertemuan, pemasangan spanduk, media sosial.

3. Pembangunan keummatan

Dalam bidang keummatan Partai Kebangkitan Bangsa membangun jaringan dan menjalin silaturahmi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat demi menjalin keharmonisan. Upaya yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam mencapai program kerja membangun keummatan perlunya menggunakan beberapa pendekatan.

Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kabupaten Buleleng

Proses pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng tidak sepenuhnya berjalan dengan harapan yang direncanakan dalam musyawarah daerah. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala-kendala sehingga hasilnya kurang maksimal baik dari kondisi, situasi, internal partai, maupun masyarakat. Diantaranya kendala tersebut adalah masyarakat beranggapan bahwa politik itu identik dengan kotor sehingga masyarakat apatis ketika partai politik memberikan pendidikan politik. Pandangan pragmatis masyarakat tentang partai politik menganggap bahwa partai politik itu kotor dan identik dengan uang, siapa yang memiliki uang yang banyak akan dengan mudah mendapatkan kekuasaan. Ditambah lagi banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh partai politik yang telah menduduki di pemerintahan maupun legislatif, sehingga membuat masyarakat menjadi antipasti terhadap partai politik.

Adapun kendala lain dalam pelaksanaan pendidikan politik bersumber dari internal partai yakni adanya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara DPC, DPAC maupun DPRanting yang merupaka ujung tombak proses kaderisasi partai politik. Hal ini membuat pengurus yang ada ditingkat desa atau ranting tidak ada keaktifan kader atau anggota sehingga saat Dewan Pengurus Cabang melaksanakan pendidikan politik maupun kegiatan lainnya kurang partisipasi dari anggota partai. Selain dari ketidakaktifan anggota, sarana dan pra sarana tidak memadai seperti tempat, LCD monitor yang sering digunakan sebagai alat pelaksanaan pendidikan politik. Kendala lainnya seperti tempat yang tidak memiliki secara permanen untuk pelaksanaan kegiatan politik. Kurangnya alokasi dana dalam melaksanakan program kerja partai meskipun dana tidak menjadi acuan dalam sebuah kegiatan partai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dana juga akan menentukan kelancaran sebuah acara, begitupun kurangnya biaya operasional dari partai dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan politik yang jarak jauh. Kemudian kendala selanjutnya kurangnya kader kader yang bisa memberikan materi maupun pendidikan ke anggota karena di daerah Kabupaten Buleleng masyarakat muslim menjadi minoritas sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa berbasis agama islam.

Pemateri menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pendidikan politik. Sehingga tersampai atau tidaknya materi bergantung bagaimana cara pemateri menyampaikan materi tersebut.

Adapun Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan politik atau kegiatan lainnya, *pertama*, partai politik berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Kedua* upaya yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng dalam menjaga komunikasi antara DPAC dan DPRanting dikarenakan ada beberapa pengurus yang tidak aktif, dengan mengadakan kunjungan ke daerah yang terdapat DPAC maupun DPRanting yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng untuk memberikan motivasi terhadap pengurus maupun anggota yang tidak aktif untuk lebih bersemangat lagi dalam memperjuangkan visi dan misi partai. *Ketiga* dalam meminimalisir pendanaan dalam sebuah kegiatan yang berkaitan dengan program kerja partai terutama mengenai pendidikan politik dengan cara menggabungkan kegiatan yang saling berkaitan untuk menjadi satu. *Keempat* dalam mengatasi ketiadaannya gedung yang bisa dipakai untuk melaksanakan pendidikan politik maupun kegiatan lainnya dengan cara menyewa tempat atau meminjam pada salah satu organisasi masyarakat, yayasan, atau lembaga pendidikan di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kepedulian terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. *Kelima* dalam mengatasi kurangnya pemateri yang ada di Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pendidikan politik.

Berdasarkan observasi di gedung Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng dan Ketua Umum, Pengurus dan Calon Dewan dari fraksi PKB tentang pendidikan politik. Ada beberapa perubahan yang terjadi saat partai politik melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan baik dalam bentuk kegiatan formal maupun non formal. Ada beberapa perubahan terhadap pengurus partai, partisian partai dan masyarakat setelah Partai Kebangkitan Bangsa melakukan pendidikan politik sesuai dengan program kerja yang sudah disepakati oleh para pengurus partai. *Pertama*, Pengurus partai politik akan sering melakukan pertemuan atau rapat untuk mempersiapkan kegiatan yang bersifat atau berkaitan dengan pendidikan politik untuk menjaga semangat dan pengetahuan anggotanya agar semua anggota partai bisa membawa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng lebih maju. *Kedua*, masyarakat yakni menganggap bahwa politik tidak selamanya berbiacara tentang uang, kekerasan dan lain-lain melainkan politik merupakan sebuah proses pendekatan antara satu orang dengan yang lain untuk mempengaruhi dan bertujuan untuk menuju sebuah kekuasaan tertentu untuk memajukan sebuah negara atau daerah dengan kekuasaannya melalui kebijakan maupun aturan-aturan. *Ketiga*, menjadi refleksi kepada seluruh anggota dan pengurus partai Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng untuk membangun partainya lebih maju dan berintegritas. Selain itu, partai politik akan menjadi berkembang karena masyarakat akan tertarik dengan kegiatan atau program yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penelitian yang dilakukan di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng mempunya metode dan strategi tersendiri sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng. Adapun bentuk kegiatan tersebut seperti pelatihan dan pembinaan, kajian rutin, kunjungan disetiap DPAC maupun DPRanting yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan jadwal yang telah ditentukan.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng

Dari beberapa persoalan yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buleleng perlu adanya upaya untuk mengatasi persoalan tersebut untuk mengurangi kekurangan yang terjadi dengan cara : a) terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang politik sebenarnya dengan menjaga citra baik partai politik, b) mengadakan kunjungan ke tingkat bawah seperti DPAC dan DPRantaing untuk menjaga silaturahmi dan menjaga keaktifan kader, c) sarana dan prasarana seperti tempat dan peralatan politik lainnya bisa menyewa maupun meminjam di lembaga pendidikan di Kabupaten Buleleng, d) mengoptimalkan kegiatan yang bersifat besar dengan konsep sederhana guna meminimalisir anggaran kegiatan, e) mendatangkan pemateri dari pusat maupun wilayah untuk memberikan pendidikan politik kepada kader tingkat bawah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aribowo,dkk. 1996. *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta: Elsam
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.
- Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakart: PT RajaGrafindo Persada
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ebyhara, Abu Bakar. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/05/09/136107/pecah-rekor-partisipasi-pemilih-di-buleleng-tembus-70-persen>.
- <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>.
- <https://www.balipuspanews.com/anggota-dprd-buleleng-dilantik-32-masih-didominasi-wajah-lama.html>
- Kodirun. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Menakar Kinerja Partai Politik Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Matthew, dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Redja. 2012. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muis, Ruslan. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Sitepu, Anthonius. 2011. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ALFABETA,CV
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Republik Indonesia tentang Partai Politik
- Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Partai Politik
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-ruzz Media
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21 Press.
- Wirarno, Budi. 2007. "*Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*" Budaya Politik Era Reformasi Tetap Bercorak patrimonial, Berorientasi Kekuasaan dan Kekayaan (*Power and Wealth*) dan Bersifat Paternalistik. Jakarta: Media Persindo.
- Marijan,Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana